

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Upah Pantarlih Diduga Dipotong Rp 1 Juta

Palmerah, Warta Kota

Upah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di DKI Jakarta diduga disumat oleh sejumlah oknum.

Temuan tersebut sebagaimana disampaikan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah dalam cuitan di akun Twitternya.

Dalam cuitannya, Ima juga meminta KPU DKI Jakarta menjelaskan temuan adanya pemotongan upah pantarlih yang dilakukan sejumlah oknum.

"Dibawah sedang ramai biaya operasional Pantarlih yang harus dikembalikan 1 juta cash dari 2 juta yang ada di rekening, juga dari sisanya ada lagi pemotongan oleh oknum. Kerja mereka berat di bawah. Harap @kpu_dki bisa memberikan penjelasan. Karena jumlah pantarlih di Jakarta ribuan," cuit Ima melalui akun Twitternya @lmadya, Jumat (7/4/2023).

Saat dikonfirmasi, Ima mengatakan mendapatkan informasi tersebut dari sejumlah laporan para pantarlih di dapilnya yang mengaku upahnya sebagai

pantarlih dipotong oleh sejumlah oknum dengan nominal bervariasi.

Ima menuturkan, di beberapa kasus, upah senilai Rp 2 juta yang masuk ke rekening pantarlih diminta dikembalikan sebesar Rp 1 juta oleh oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun oknum di kelurahan setempat.

"Bahkan ada yang minta dikembalikan tanpa tanda terima," kata Ima, Jumat.

Pasalnya, jika memang upah yang harusnya diterima Rp 2 juta namun fakta di lapangan mereka hanya menerima Rp 1 juta maka patut dipertanyakan kemana uang sisanya itu mengalir.

Adapun jumlah pantarlih di DKI Jakarta secara keseluruhan ada 30.683 orang.

"Kalau Rp 1 juta itu dipotong oleh oknum dan dikalikan 30.000 jumlah pantarlih se-Jakarta maka sudah Rp 30 miliar. Nah KPU DKI diharapkan bisa memberikan penjelasannya," tuturnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat, Cucum Sumardi buka suara soal dugaan adanya pemotongan upah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

(Pantarlih) di wilayahnya.

Cucum mengatakan pihaknya telah mengecek soal dugaan potongan upah tersebut.

Dia mengklaim tak ada pemotongan upah terhadap para Pantarlih di empat kelurahan di Jakarta Barat tersebut.

"Kami membantah atas beredarnya berita bahwa telah terjadi pemotongan honor pantarlih di 4 kelurahan Jakarta Barat dan kami sudah melakukan investigasi ke-empat kelurahan tersebut," kata Cucum kepada wartawan, Senin (10/4/2023).

Cucum menjelaskan bahwa di Jakarta Barat, pembayaran honor pantarlih terbagi menjadi dua cara.

Cara pertama sebanyak 5.501 orang dibayarkan langsung melalui rekening pantarlih dan 1.667 orang dibayarkan melalui rekening dana pemilu sekretariat PPS.

"Cara kedua karena ada keterlambatan proses pembuatan buku tabungan dan ATM oleh pihak BRI sehingga diambil langkah melalui rekening dana pemilu," ujar Cucum. (m27)